

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang di berikan kepada keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah memenuhi syarat sebagai penerima bantuan PKH. Selain itu sebagai bantuan program bantuan sosial bersyarat sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita presiden RI sebagai program perlindungan sosial yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil analisa data pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Gayamsari Kota Semarang secara umum sudah berjalan dengan baik hanya saja masih ada ditemukan beberapa kendala yang menghambat keberhasilan implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan. Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Gayamsari Kota Semarang dapat dilihat dari beberapa indikator implementasi yaitu Isi Kebijakan dari Merilee S. Grindle berikut ini :

1. Content of Policy

- a. Pada Implementasi kebijakan program keluarga harapan ditemukan beberapa indicator sudah berjalan dengan baik yaitu meliputi : pertama, kepentingan yang memengaruhi dalam implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan sudah sesuai dengan kepentingan pihak-pihak yang mempengaruhi kebijakan. Hal ini disebabkan oleh pihak-pihak yang terlibat sudah sesuai dengan ketentuan hukum sehingga berpotensi terjadinya keberhasilan dalam implementasinya. Kedua, tipe

manfaat dalam implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan masyarakat yang sudah menjadi KPM, sudah mendapatkan bantuan yang akan dibantu oleh pendamping dengan diberikan arahan terkait penyaluran bantuan serta kewajiban yang harus dilaksanakan oleh KPM. Namun terkait peningkatan pendapatan pada keluarga penerima manfaat masih belum terlaksana dengan baik serta Solusi yang diberikan kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi seperti memberikan sosialisasi melalui P2K2 yang dilakukan pendamping dan juga pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat lalu dibantu oleh pendamping juga di anggap efektif untuk kelancaran implementasi kebijakan ini. Ketiga, pelaksana program dalam implementasi kebijakan Program Keluarga harapan termasuk berjalan dengan baik. Tingkat pemahaman dan kompetensi dari seorang pelaksana kebijakan menjadi hal yang penting dalam pelaksana kebijakan Program Keluarga Harapan.

- b. Pada indikator *Content of Policy* masih ditemukan juga beberapa kendala yang menghambat keberhasilan implementasi Kebijakan yang terjadi di lapangan yang meliputi : Pertama, derajat perubahan yang diinginkan bahwa belum dapat dikatakan berhasil dibuktikan dengan peningkatan taraf hidup keluarga penerima manfaat belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikareakan masih ditemukannya keluarga penerima manfaat yang terlalu bergantung pada bantuan ini dan tidak memiliki usaha untuk meningkatkan taraf hidupnya. Selalin itu program ini belum bisa meningkatkan pendapatan sehingga belum bisa meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat di Kecamatan Gayamsari. Kedua, letak pengambilan

keputusan yang masih terdapat beberapa kendala seperti penetapan KPM yang masih belum tepat sasaran dikarenakan ketidakcocokan data yang ada dengan yang terjadi dilapangan. Ketiga, sumber daya dilibatkan dalam implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan masih kurang pada bagian ketersediaan sumber daya manusia dan fasilitas penunjang. Selain itu, fasilitas penunjang masih ditemukan kekurangan fasilitas pada saat dilakukan pendampingan di lapangan seperti tempat yang disediakan untuk dilakukan P2K2, laptop, lcd, serta internet sebagai penunjang pelaksanaan sosialisasi.

2. *Context of Policy*

- a. Pada Implementasi kebijakan program keluarga harapan ditemukan beberapa indicator sudah berjalan dengan baik yaitu meliputi meliputi: pertama, Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat dalam implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Gayamsari tidak ada kekuasaan dan kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi para pelaksana kebijakan memang sesuai dengan amanat yang telah direncanakan tanpa adanya intervensi dari pihak lain yang memiliki kekuasaan dan kepentingan-kepentingan tertentu serta strategi yang digunakan oleh actor juga tepat dan sudah dilakukan untuk keberhasilan implementasi kebijakan. Ketiga, implementasi Program Keluarga Harapan Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana dapat diketahui bahwa para pelaksana kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Gayamsari sudah merespon dengan baik dalam implementasinya dan mengikuti sesuai dengan adanya peraturan yang ada.

- b. Pada indikator *Context of Policy* masih ditemukan juga beberapa kendala yang menghambat keberhasilan implementasi Kebijakan yang terjadi di lapangan yaitu : Karakteristik Lembaga dan Daya Tanggap lamanya proses penetapan calon PKH serta tidak transparannya hasil penetapan membuat masyarakat tidak puas, kemudahan pengaduan yang tidak diimbangi dengan respon yang baik dalam menyelesaikan pengaduan dinilai belum bisa memuaskan keluarga penerima manfaat.
3. Faktor pendukung dan penghambat secara keseluruhan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan implementasi program keluarga harapan. Adapun rinciannya sebagai berikut :
- a. Factor pendukung dalam implementasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Gayamsari yaitu: pertama, koordinasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pendamping di respon baik oleh pihak – pihak pelaksana serta sasaran kebijakan yaitu Keluarga Penerima Manfaat. Hal ini dikarenakan koordinasi yang dilakukan antar pihak – pihak pelaksana terjalin baik dan saling membantu untuk menyukseskan implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Gayamsari. Kedua, pengelolaan sumber daya finansial dimana pengelolaan anggaran telah dijalankan serta diserap dengan baik yang dibuktikan dengan adanya penambahan anggaran akan selalu diikuti dengan penambahan kuota Keluarga Penerima Manfaat PKH.
- b. Faktor penghambat dalam implementasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Gayamsari yaitu: pertama, kesadaran dari masyarakat

sendiri masih kurang, sehingga kebijakan dari Program Keluarga Harapan ini masih belum terlaksana dengan baik. Kesadaran masyarakat yang masih kurang membuat pengimplementasian kebijakan Program Keluarga Harapan ini terhambat dan dibutuhkannya pemahaman terkait program. Kedua, masih kekurangan sumber daya manusia dalam menangani KPM. Pendamping Program Keluarga Harapan mengalami kesulitan karena beban kerja yang tidak sebanding dengan jumlah KPM PKH, dimana jumlah KPM yang harus didampingi setiap pendamping PKH di Kecamatan Gayamsari telah melebihi standar rata – rata jumlah KPM. Perbedaan jumlah ini menimbulkan beban kerja yang dialami pendamping keluarga penerima manfaat di Kecamatan Gayamsari.

4.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Guna meningkatkan keberhasilan implementasi Program Keluarga Harapan Perbaikan yang perlu dilakukan terkait derajat perubahan yang diinginkan sebaiknya dengan : a. Meningkatkan ketegasan pendamping PKH dalam melakukan pengawasan kepada KPM dalam menjalankan kewajibannya, b. Meningkatkan kemampuan KPM untuk lebih produktif. c. Meningkatkan kualitas pendamping PKH dengan memberikan pelatihan dan pembekalan kepada pendamping PKH untuk meningkatkan kualitas layanannya.

2. Guna meningkatkan keberhasilan implementasi Program Keluarga Harapan Perbaikan yang perlu dilakukan terkait letak pengambilan keputusan sebaiknya dengan : a. memperbaharui data lama dengan data yang lebih terbaru agar tepat sasaran. b. pengecekan ulang pada data yang diberikan pusat. c. meningkatkan jumlah KPM di BDST, serta meminimalisir kuota PKH diluar RTSM
3. Guna memastikan keberhasilan pelaksanaan Program Keluarga Harapan terkait sumber daya yang dilibatkan perlu adanya peningkatan dalam : a. menambah jumlah pendamping PKH, b. memenuhi fasilitas penunjang, seperti tempat untuk P2K2, laptop, LCD, dan internet serta meningkatkan koordinasi antar stakeholder.
4. Guna memastikan keberhasilan pelaksanaan Program Keluarga Harapan terkait Karakteristik Lembaga dan Daya Tanggap perlu adanya peningkatan dalam transparansi penetapan KPM, serta meningkatkan ketanggapan pemerintah dalam membantu permasalahan yang dihadapi KPM.
5. Perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap PKH: a. meningkatkan sosialisasi tentang PKH, b. melakukan edukasi tentang PKH kepada masyarakat dan membangun stigma positif terhadap KPM PKH.
6. Perbaikan yang perlu dilakukan terkait sumber daya manusia dalam meningkatkan potensi sumber daya pada implementasi Program Keluarga Harapan: a. menambah jumlah pendamping PKH, b. memberikan pelatihan kepada pendamping PKH dan c. meningkatkan kesejahteraan pendamping PKH.